BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam sebuah jurnal ilmiah yang berasal dari *Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology* vol 5 pada hal 1-21 yang ditulis oleh Bashkim Mustafa dengan judul "*Criteria for Allocation of Grants from the Central Budget for the Municipalities in Kosovo"* pada tahun 2011, meneliti mengenai pengalokasian dana yang diberikan oleh UNMIK terhadap Kosovo. Pemberian dana ini disalurkan melalui program *"treasury system"* yang merupakan sebuah sistem yang sama dengan sistem yang digunakan oleh organisasi anggaran pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa walaupun telah melalui banyak tantangan yang harus dilewati dikarenakan perubahan status negaranya, Kosovo telah memberikan kemajuan yang berarti dalam infrastruktur resmi dalam pengalokasian dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kosovo telah berkelanjutan membuat perubahan dalam pengalokasian dana, yang disesuaikan dengan perubahan keadaan negaranya, walaupun terdapat banyak masalah dan juga kurangnya data yang akurat mengenai sensus kependudukan (www.scientificpapers.org/economics/criteria-for-allocation-of-grants-from-the-central-budget-for-the-municipalities-in-kosovo/ diakses 26 April 2014).

Dalam penelitian ini terdapat beberapa kriteria yang harus dimasukkan dalam pengalokasian dana yang diberikan, diantanya adalah tingkat perkembangan

ekonomi dari tiap daerah, tingkat kerusakan akibat perang, serta pembentukan dana tambahan untuk kota berkembang. Apabila kriteria-kriteria diatas dapat dimasukkan dalam pertimbangan ketika akan menyalurkan dana yang diberikan kepada pemerindah daerah, maka pengalokasian dana-dana untuk memajukan daerah tersebut akan lebih efektif dan lebih merata di berbagai bidang, sehingga ketidakpuasan akan lebih berkurang bila dibandingkan dengan pengalokasian dana yang tidak merata. Pengalokasian dana-dana ini seperti dalam bidang pendidikan dan kesehatan, terutama dalam bidang pendidikan, yang akan dijadikan standar pendidikan masyarakat Kosovo, yang mempunyai misi untuk bergabung dengan UE

Hal ini sama seperti pemberian bantuan yang diberikan oleh UE melalui IPA *(Instrumen Pre-Accession Assistance)* yang dialokasikan ke berbagai bidang perekonomian Kosovo yang diharapkan dapat mampu menigkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara Kososo (under UNSCR 1244/99) di saat ini dan masa yang akan datang. Pengalokasian dana ini juga diharapkan dapat dibagikan secara merata di semua bidang-bidang perekonomian, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan sempurna.

Dalam penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Brillian Budi Nurani pada tahun 2003 yang berjudul *Peran Uni Eropa dalam Menyelesaikan Krisis Keuangan di Siprus*, penulis merujuk penelitian ini karena penelitian ini merupakan salah satu dari sedikit kajian yang membahas bagaimana peran Uni Eropa sebagai organisasi kawasan dalam membantu permasalahan yang terjadi pada negara di kawasan Eropa. Dalam penelitian ini Budi Nurani membahas bagaimana Uni Eropa sebagai

organisasi kawasan membantu Siprus agar keluar dari krisis yang terjadi sebagai dampak dari *Domino Effect* krisis Yunani.

Budi Nurani selaku penulis menjelaskan bahwa krisis yang terjadi di Siprus sebagai *Domino Effect* dari krisis Yunani yang menyebabkan tertahannya investasi keuangan Siprus dan ketidaksanggupan Yunani untuk mengembalikannya sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Selain itu, juga mengakibatkan terhambatnya kegiatan perekonomian Siprus dan terancam tertutupnya bank-bank di Siprus. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Siprus namun masih tidak berhasil, karena itulah Siprus meminta bantuan dari Uni Eropa sebagai organisasi regional untuk membantu menyelesaikan permasalahan di negaranya. Uni Eropa yang merupakan satu-satunya organisasi regional di Eropa berkewajiban membantu negara yang kesulitan di kawasan Eropa, bantuan yang di berikan oleh Uni Eropa kepada Siprus berupa bantuan bailout sebesar 9 miliar Euro yang disertai dengan paket program penyesuaian ekonomi yang akan membahas tentang tantangan fiscal dan structural keuangan jangka pendek dan jangka menengah yang dihadapi oleh Siprus.

Berdasarkan penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Uni Eropa sebagai organisasi kawasan di Eropa benar-benar menjalankan perannya sebagai satu-satunya organisasi regional dengan berupaya semampunya dalam membantu setiap permasalahan yang terjadi di wilayah Eropa. Hal ini juga termasuk bantuan yang diberikan kepada Kosovo yang merupakan salah satu negara termiskin di Eropa yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, serta rendahnya lapangan pekerjaan dengan memberikan bantuan dana melalui program IPA.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rosi Dwi Fitri Aprilia dari Universitas Negeri Malang pada tahun 2012 yang berjudul *Peran UNMIK Dalam Pemulihan negara Kosovo Pasca Konflik Etnis Serbia dan Albania*, dalam penelitian tersebut Aprilia menyimpulkan bahwa PBB sebagai sebuah organisasi penjaga pendamaian dunia yang berkewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk menjaga dunia agar dapat tertib, aman dan damai perlu mengambil tindakan dalam konflik yang terjadi di Kosovo sehingga masalah tidak berlarut-larut. Peranan PBB dalam hal ini, yaitu dengan membentuk suatu organisasi yang disebut UNMIK (United Nations Interim Administration for Kosovo), yaitu badan khusus yang ditugaskan untuk membentuk pemerintahan administrasi di Kosovo pasca lengsernya Milosevic. Tugas UNMIK meliputi pembangunan kembali sarana dan prasarana yang ada di Kosovo antara lain sarana kesehatan, pendidikan, perbankan, keuangan, pos dan telekomunikasi, hukum, dan ketertiban masyarakat. Pasca konflik yang terjadi di Kosovo, negara ini banyak mengalami kehancuran di berbagai bidang.

PBB mempunyai agenda perdamaian yang disebut dengan *An Agenda for Peace* (Agenda untuk Perdamaian) yang dijadikan dasar UNMIK untuk bertugas di Kosovo meliputi Diplomasi *Preventif, Peacemaking, Peacekeeping, dan Peacebuilding.* Melalui dasar-dasar inilah UNMIK mulai melakukan perbaikan-baikan dalam sector ekonomi dengan membangun kembali sarana kesehatan dan pendidikan yang rusak pada saat konflik, secara bertahap UNMIK juga mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara memberikan bantuan kepada masyarakat yag membutuhkan modal usaha melalui pinjaman lunak. Pembangunan kembali di

bidang ekonomi menjadi prioritas utama UNMIK dikarenakan pembangunan di bidang ini dapat membantu pembangunan di bidang-bidang lainnya.

Melalui penelitian diatas, penulis melihat pentingnya peranan suatu organisasi internasional dalam pembangunan ekonomi suatu negara terutama pasca konflik yang terjadi, sama seperti Uni Eropa yang telah berada di Kosovo ketika negara ini masih berkonflik dengan Serbia hingga saat ini Kosovo telah merdeka, Uni Eropa tetap memberikan bantuan agar Kosovo tetap dapat memulihkan perekonomian pasca perang, serta dapat melanjutkan pembangunan ekonomi menjadi lebih maju dan lebih stabil di masa yang akan datang.

2.2. Kerangka Pemikiran

2.2.1. Hubungan Internasional

Hubungan internasional merupakan suatu hubungan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa atau negara-negara, atau merupakan suatu hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi yang melewati dan melampaui suatu batas-batas kenegaraan. Menurut Johari, hubungan internasional pada dasarnya merupakan suatu studi mengenai interaksi antar aktor, baik negara maupun aktor non-negara, yang berlangsung di dalam sistem internasional dan hubungan yang dijalin dapat berbentuk hubungan ekonomi, sosial budaya, maupun politik, yang memiliki konsekuensi-konsekuensi penting bagi aktor-aktor lainnya diluar unit politiknya (Johari, 1985: 5).

Pada dasarnya hubungan internasional terjadi karena keinginan negara-negara untuk mengadakan kerjasama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, serta untuk mencapai tujuan negaranya, suatu negara tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, ia akan membutuhkan bantuan dari negara lain agar dapat terus bertahan. Oleh karena itu, dalam pemenuhan kebutuhan serta pencapaian tujuan yang diinginkan, maka suatu negara akan mengadakan suatu hubungan internasional dengan negara lain. Hubungan internasional menjadi penting bagi suatu negara, karena tidak ada negara yang dapat berdiri sendiri tanpa ada bantuan dari negara lain. Melalui hubungan internasional yang terjalin inilah, pencapaian tujuan negara akan lebih mudah dilakukan dan akan lebih cepat terlaksana.

Perwita dan Yani dalam buku *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, menyatakan bahwa:

> "Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar." (Perwita & Yani, 2005: 3-4).

Suatu hubungan inernasional tercipta dengan adanya interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu. Negara merupakan aktor penting yang berperan dalam terciptanya suatu hubungan internasional, hal ini dikarenakan negara memiliki tanggung jawab dalam

memenuhi kebutuhan warga negaranya. Akan tetapi sekarang ini, dalam melakukan suatu hubungan internasional tidak hanya terbatas bagi negara saja, tetapi hal ini juga dapat dilakukan oleh organisasi-organisasi yang ada di negara tersebut, bahkan juga dapat dilakukan oleh individu secara langsung untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.

Tujuan utama dari studi hubungan internasional seperti yang disampaikan oleh Mas'oed adalah:

> Tujuan utama dari studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku aktor, negara maupun non negara, didalam arena transaksi internasional, dimana perilaku tersebut bisa berwujud perang, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional dan sebagainya (Mas'oed, 1994: 31-32).

Berdasarkan tujuan diatas, studi hubungan internasional mempelajari setiap perilaku yang dilakukan oleh para aktor internasional ketika melakukan hubungan dengan aktor-aktor internasional lainnya, proses pembelajaran perilaku ini tidak hanya terbatas pada kerjasama yang dilakukan, tetapi juga mencakup perselisihan yang berakibat terjadinya perang antar negara, serta mempelajari bagaimana sebuah interaksi yang dilakukan oleh para aktor internasional akan mengahsilkan sebuah aliansi dengan aktor lain yang memiliki kepentingan yang sama.

2.2.2 Organisasi Internasional

2.2.2.1 Definisi dan Klasifikasi Organisasi Internasional

Berbagai pengertian mengenai organisasi internasional dikemukakan untuk membantu memahami pentingnya peran dari organisasi internasional dalam

komunitas internasional sehingga dapat diakui sebagai salah satu aktor internasional. Salah satunya adalah yang diungkapkan oleh T. May Rudi, yaitu organisasi internasional merupakan pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari pada struktur organisasi yang lingkupnya jelas serta melaksanakan fungsi secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun sesame kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda (May Rudi, 1993: 3).

Organisasi internasional akan mempengaruhi kebijakan luar negeri anggotanya melalui partisipasi mereka dalam organisasi tersebut. Keberadaan organisasi internasional ini serta kebutuhan partisipasi dianggap sebagai magnet yang menarik kearah perubahan dalam perilaku politik luar negeri dan proses pembuatan keputusan dari negara-negara anggotanya. Salah satu alasan terbentuknya organisasi internasional juga dikarenakan adanya kepentingan dan kebutuhan setiap negara, serta adanya keinginan untuk bekerjasama secara internasional yang memberikan manfaat dengan tidak melanggar kedaulatan dan kekuasaan negara anggota.

Organisasi internasional biasanya terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu *Intergovernmental Organizations (IGOs)* yang merupakan institusi yang anggotanya adalah wakil delegasi resmi pemerintah negara-negara, serta *International NonGovernmental Organizations (INGOs)* yang merupakan institusi yang anggotanya terdiri dari anggota-anggota yang bukan perwakilan dari negara atau pemerintah namun merupakan suatu kelompok, asosiasi, organisasi ataupun

individu dari suatu negara, serta International Organization Hybrid merupakan suatu institusi yang anggotanya terdiri dari gabungan wakil-wakil pemerintah dan non-pemerintah.

Dalam perkembangannya pengklasifikasian ini belum mencangkup aspek penting lain yang terdapat dalam organisasi internasional. Karena itu pengklasifikasian organisasi internasional ini kemudian dikembangkan kembali oleh Frederic S. Pearson dan J. Martin Rochester kedalam tiga tipe, yaitu:

1. Keanggotaan
   Berdasarkan keanggotaannya organisasi internasional dibagi dua tipe, yaitu:
   a. Inter Governmental Organizations (IGOs) merupakan bentuk organisasi internasional yang anggotanya dari pemerintahan nasional dan dibentuk melalui perjanjian antar negara.
   b. Non Governmental Organizations (NGOs), organisasi ini beranggotakan individu-individu atau kelompok-kelompok privat yang berasal dari berbagai negara.
      Beberapa organisasi internasional tidak seratus persen masuk dalam kategori IGO maupun NGO, contohnya seperti International Labour Organization (ILO) yang tidak hanya beranggotakan agen dari pemerintah saja tetapi juga beranggotakan persatuan-persatuan buruh dan kelompok-kelompok pekerja.
2. Letak Geografi
   Berdasarkan letak wilayah suatu negara, organisasi internasional dapat dibedakan kedalam dua bentuk yaitu regional dan global. IGOs dan NGOs dapat berbentuk organisasi internasional regional bila anggota-anggotanya berasal dari kawasan tertentu, seperti Assosiation South East Asian Nation merupakan bentuk dari IGOs yang beranggotakan negara-negara Asia Tenggara saja. Sedangkan organisasi internasional yang dikatakan global bila anggota-anggotanya bebas dari seluruh negara dan ruang kerjanya tidak sebatas hanya suatu kawasan tertentu seperti halnya organisasi regional. Contoh dari organisasi yang bersifat global adalah International Civil Aviation Organization (ICAO) yang merupakan organisasi Penerbangan Sipil Internasional.
3. Fungsi
   Seperti halnya organisasi lain, organisasi internasional juga didirikan untuk menjalankan fungsinya dalam mencapai tujuan. Organisasi internasional yang tujuannya bersifat umum atau disebut sebagai multipurpose organizations, contohnya PBB dan ASEAN. Sedangkan organisasi internasional yang bersifat khusus disebit sebagai limited purpose

organizations, contohnya WHO dan FAO (Pearson dan Rochester, 1984: 319-324).

2.2.2.2 International Governmental Organizations (IGOs)

Organisasi antar pemerintah atau IGO merupakan salah satu bentuk dari Organisasi Internasional yang terbentuk dari dua negara atau lebih. Di dalam organisasi-organisasi ini, kepentingan dan kebijakan dari para anggota negara diajukan oleh perwakilan dari negara-negara yang bersangkutan, keanggotaan di IGOs ini bersifat penuh, legal sukarela dan terbuka bagi semua negara. Otoritas para pembuat keputusan diberikan pada perwakilan pemerintah yang bergabung dalam IGO (Willets dalam Baylis dan Smith, 2001: 376). Salah satu bentuk dari organisasi internasional adalah IGO, dimana keanggotaan dalam organisasi ini merupakan negara secara individual, dimana negara berperan dalam segala pengambilan keputusan.

Menurut Coloumbis dan Wolfe, IGOs berdasarkan keanggotaan dan tujuannya diklasifikasikan atas empat kategori, yaitu:

1. Organisasi yang keanggotaan dan tujuannya juga umum, organisasi ini ruang lingkupnya global dan melakukan berbagai fungsi, seperti keamanan, kerjasama sosial-ekonomi, dan lain-lain. Contohnya seperti PBB.
2. Organisasi yang keanggotaannya umum dan tujuannya terbatas dikenal juga dengan nama organisasi fungsional karena organisasi ini dikhususkan pada suatu fungsi yang spesifik. Contohnya seperti badan-badan PBB untuk kesehatan dunia (WHO).
3. Organisasi yang keanggotaannya terbatas dan tujuannya umum, merupakan organisasi regional yang fungsi dan tanggung jawab politik, sosial ekonomi dan keamanannya berskala luas. Contohnya seperti Organisasi Persatuan Afrika (OAU).
4. Organisasi yang keanggotaan dan tujuannya juga terbatas. Organisasi ini dibagi atas organisasi sosial-ekonomi dan organisasi

> militer/pertahanan. Contoh organisasi sosial-ekonomi adalah Asosiasi Perdagangan Bebas Amerika Latin (LAFTA), sedangkan untuk contoh organisasi militer/pertahanan adalah aliansi yang pembentukannya berhubungan dengan militer, seperti pada perang dingin yaitu Pakta Warsawa dan NATO.

Berdasarkan kategori yang telah disebutkan diatas, Uni Eropa merupakan salah satu IGOs yang dapat dikategorikan kedalam organisasi yang keanggotaannya terbatas dan tujuannya umum. Anggota Uni Eropa harus negara-negara yang berada di kawasan Eropa, terdapat persyaratan-persyaratan tertentu bila ingin menjadi anggota Uni Eropa, selain itu Uni Eropa juga memiliki badan-badan khusus yang menangani berbagai kajian masalah dan memiliki ruang lingkup yang luas seperti kerjasama sosial ekonomi, perlindungan hak asasi manusia, serta keamanan.

2.2.2.3 Peranan Organisasi Internasional

Peranan dapat dikatakan sebagai pelaksanaan dari fungsi oleh struktur-struktur tertentu, yang bergantung pada posisi atau kedudukan struktur serta harapan lingkungan sekitar terhadap struktur tersebut. Peranan juga dapat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi serta kemampuan dari si pemeran dalam hal ini individu maupun organisasi. Menurut Mas'oed, teori peranan merupakan perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh suatu entitas yang menduduki suatu posisi. Ini adalah perilaku yang dilekatkan pada posisi tersebut, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi tersebut.

Semua organisasi internasional memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuannya. Apabila struktur-struktur tersebut telah menjalankan fungsinya, maka organisasi tersebut telah menjalankan peranan tertentu. Dengan

demikian, peranan dapat dianggap sebagai fungsi baru dalam rangka pengejaran tujuan-tujuan kemasyarakatan.

Konsep peranan dalam organisasi internasional baik intergovernmental organizations (IGOs) maupun International NonGovernmental Organizations (INGOs) menurut Clive Archer memiliki tiga peranan yang dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Sebagai instrument, dalam artian organisasi internasional merupakan suatu alat bagi negara-negara untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu serta untuk memaksimalkan tujuan sesuai dengan kebijakan luar negerinya.
2. Sebagai arena atau forum, dimana tindakan-tindakan yang berhubungan dengan pembahasan suatu masalah yang terjadi. Dalam hal ini, organisasi internasional menyediakan sebuah tempat pertemuan diantara anggota-anggotanya untuk berdiskusi maupun berargumen dalam mengungkapkan pandangannya mengenai suatu permasalahan.
3. Sebagai aktor. Dimana peran ini menunjukkan organisasi internasional sebagai sebuah badan independen yang melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah disepakati bersama sebelumnya. Organisasi internasional sebagai sebuah aktor harus dapat bertindak secara independen tanpa dipengaruhi oleh suatu kekuatan tertentu (Archer, 1983: 130-147).

Dalam hubungan internasional, negara merupakan aktor utama, dan non-negara merupakan aktor sampingan, namun dalam hal ini organisasi internasional bisa dikatakan merupakan sebuah sarana bagi negara untuk menyebarkan kepentingan atau *interest* ke negara lain. Selain itu organisasi internasional juga memiliki peran untuk membina perdamaian internasional dan juga menyelesaikan sengketa maupun konflik yang terjadi baik bersifat regional maupun internasional. Hal ini dikarenakan sebagian besar negara-negar yang berkonflik akan meminta bantuan dari sebuah organisasi internasional untuk memediasi ataupun

menyelesaikan konflik atau permasalahan yang sedang terjadi di negara tersebut, baik itu masalah regional maupun masalah dengan negara lain.

2.2.2.4 Fungsi Organisasi Internasional

Organisasi internasional selain memiliki peranan tertentu dalam organisasinya juga memiliki berbagai fungsi yang berguna agar organisasi internasional tersebut tidak menyimpang dari tujuannya semula yang telah disepakati bersama. Dalam melihat fungsi yang dijalankan oleh organisasi internasional, Hass membagi fungsi organisasi internasional kedalam dua bagian yaitu fungsi input dan output. Fungsi input yang dijalankan oleh organisasi internasional pada dasarnya berhubungan dengan lembaga-lembaga pemerintah dari system politik domestik negara-negara anggotanya. Fungsi input tersebut antara lain:

1. Artikulasi, organisasi internasional merupakan tempat dimana aspirasi atau keinginan dari negara-negara anggotanya disampaikan.
2. Agregasi, merupakan penyatuan dari berbagai macam aspirasi untuk membentuk suatu sikap terpadu yang dijadikan sebagai acuan tindakan organisasi internasional tersebut.
3. Sosialisasi, organisasi internasional mempunyai tugas sebagai agen uuntuk mensosiialisasikan keputusan-keputusan yang telah disepakati kepada individu atau kelompok dalam negara-negara anggotanya.
4. Rektuitmen, merupakan proses pencarian anggota baru dalam organisasi internasional yang memiliki komitmen dan tujuan bersama.

5. Transaksi, berhubungan erat dengan komunikasi yang dilakukan antarnegara anggota organisasi internasional tersebut.

Sementara itu, fungsi output menurut Haas merupakan fungsi-fungsi yang berhubungan dengan peratura-peraturan dari suatu organisasi internasional, fungsi output ini meliputi:

1. Rule Making, organisasi internasional memiliki fungsi sebagai pembuat peraturan-peraturan melalui prosedur dan mekanisme tertentu yang dimilikinya.
2. Rule Application, ketika peraturan ditetapkan, maka organisasi internasional tersebut juga harus menjadi pelaksana dari peraturan-peraturan tersebut.
3. Rule Supervision, organisasi internasional melalui badan khususnya bertugas untuk mengawasi sejauh mana pelaksanaan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan dijalankan (Haas dalam Rosenau, 1969: 133-134)

2.2.3 Bantuan Luar Negeri

Bantuan luar negeri merupakan salah satu instrumen kebijakan yang sering digunakan dalam hubungan luar negeri, secara umum bantuan luar negeri dapat diartikan sebagai transfer sumber daya dari suatu pemerintah ke pemerintah yang lain, baik itu berbentuk barang ataupun dana.

Menurut Sukirno dalam Perwita dan Yani, bahwa bantuan luar negeri pada umumnya tidak ditujukan hanya untuk kepentingan jangka pendek, melainkan untuk prinsip-prinsip kemanusiaan dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Setidaknya terdapat dua syarat aliran modal luar negeri yang merupakan bantuan luar negeri :

1. Aliran modal dari luar negeri tersebut bukan didorong untuk mencari keuntungan.

2. Aliran modal dari luar negeri tersebut diberikan kepada negara penerima atau dipinjamkan dengan syarat yang lebih ringan daripada yang berlaku dalam pasar internasional.

Menurut Michael Todaro dalam buku Yanuar Ikbar, bantuan luar negeri adalah bantuan yang meliputi semua pinjaman konsesional (suku bunga dan jangka pembayaran kembali modal yang dipinjamkan secara lunak dibandingkan dengan syarat-syarat yang berlaku bagi pinjaman komersial) dan bantuan pemerintah dalam bentuk uang atau barang, mengalihkan sumber-sumber dari negara kaya ke negara dunia ketiga dengan tujuan untuk pembangunan atau pemerataan pendapatan. Bantuan luar negeri dapat dipilah menjadi bantuan berupa pemberian (hibah), bantuan pinjaman dan bantuan berupa penanaman modal (investasi) asing (Ikbar, 1995: 207).

Saat ini masalah-masalah pembangunan dan kerjasama ekonomi menjadi agenda utama dalam politik internasional. Teknik pemberian bantuan dapat dilakukan secara bilateral maupun multilateral. Dengan kata lain, pemberian bantuan luar negeri dapat dilakukan antar pemerintah (*government to government*), melalui suatu organisasi internasional ataupun melalui lembaga keuangan internasional seperti IMF dan *World Bank*. Ada empat motivasi dari negara para pemberi bantuan atau negara donor dalam memberikan bantuan, diantaranya :

1. Motif kemanusiaan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di negara-negara dunia ketiga melalui dukungan kerjasama ekonomi
2. Motif politik yang memusatkan tujuan untuk meningkatkan *image* negara donor. Peraihan pujian menjadi tujuan dari pemberian bantuan luar negeri baik dari politik domestik dan hubungan luar negeri negara donor

3. Motif keamanan nasional, yang mendasarkan pada asumsi bahwa bantuan luar negeri dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang akan mendorong stabilitas politik dan akan memberikan keuntungan pada kepentingan negara donor. Dengan kata lain, motif keamanan memiliki sisi ekonomi
4. Motif yang berkaitan dengan kepentingan nasional negara donor (Rix Alan dalam Perwita&Yani, 2005: 84).

Berdasarkan keempat motivasi diatas, dapat dilihat bahwa pada hakekatnya bantuan luar negeri (*foreign aid*) merupakan bantuan yang diberikan kepada suatu negara oleh pemerintahan negara lain ataupun lembaga internasional baik berupa bantuan ekonomi, sosial dan militer yang diberikan secara bilateral maupun multilateral, yang tujuannya antara lain untuk mendukung persekutuan, membangun ekonomi, meraih dukungan ideologis, memperoleh bahan baku strategis, kemanusiaan, serta menyelamatkan kehidupan bangsa dari bahaya keruntuhan ekonomi ataupun bencana alam.

Bantuan luar negeri merupakan salah satu instrumen kebijakan yang sering dan telah digunakan dalam hubungan luar negeri selama berabad-abad pada masa lampau, instrumen ini tidak hanya digunakan untuk permasalahan politik jangka pendek melainkan untuk prinsip-prinsip kemanusiaan atau pembangunan ekonomi jangka panjang. Dalam jangka panjang, bantuan luar negeri dimaksudkan untuk membantu menjamin beberapa tujuan politik negara donor yang tidak dapat dicapai hanya melalui diplomasi, propaganda atau kebijakan publik.

Salah satu bentuk bantuan luar negeri yang diberikan yaitu berupa bantuan ekonomi. Bantuan ekonomi merupakan pemberian bantuan dalam bentuk fisik san keuangan kepada negara-negara yang sedang berkembang sebagai sarana untuk memperkuat perekonomian mereka. Bantuan dapat diberikan antara pemerintah

dengan pemerintah, maupun dari sebuah organisasi internasional kepada pemerintah. Seperti contohnya adalah *World Bank,* IMF, ataupun badan Uni Eropa yang membentuk program khusus untuk pemberian bantuan ekonomi bagi negara anggota maupun negara bukan anggota.

2.2.4 Ekonomi Politik Internasional

Pada masa sekarang setiap negara saling bergantung dan membutuhkan kerjasama antara satu dengan yang lainnya dalam pemenuhan kebutuhan serta memperoleh kepentingan nasional. Ketika membahas mengenai kerjasama, maka tidak hanya unsur ekonomi sajayang berperan didalamnya, tetapi juga unsur politik seperti kekuasaan. Begitu juga dengan hubungan internasional pada masa kini dimana tidak hanya berbicara mengenai penyelesaian masalah-masalah dunia yang hanya berkaitan dengan konflik dan kesiagaan militer saja, namun juga telah melibatkan dimensi ekonomi dalam proses pelaksanaan hubungan antar aktor internasional. Pada saat ini pula, politik dunia tidak bisa di pahami lagi hanya sebatas melalui satu perpekstif saja, studi hubungan internasional tidak cukup bila hanya membahas soal politik tanpa mempelajari ekonomi. Maka dari itu, dikarenakan keterkaitan antara ekonomi (kesejahteraan) dan politik (kekuasaan) inilah sehingga dikenaldalam hubungan internasional sebagai ekonomi politik internasional.

Studi tentang ekonomi politik internasional merupakan studi yang termasuk baru muncul dibandingkan dengan studi lainnya. Gilpin dalam bukunya yang berjudul *Global Political Economy* mengungkapkan bahwa ekonomi politik

internasional merupakan dinamika interaksi global antara pengejaran kekuasaan (politik) dan pengejaran kekayaan (ekonomi), yang terdapat hubungan timbal balik diantara keduanya. Dalam hal ini pengertiannya dapat dikatakan bahwa ketika suatu negara dapat memainkan poltiknya secara benar, maka perekonomian pun akan dapat dikuasai. Ekonomi politik internasional sendiri secara sederhana dapat diartikan menjadi dua kata yaitu *state* (negara) dan *market* (pasar). Ketika negara berusaha secara maksimal mengendalikan pasar untuk kepentingannya maka telah terjadi hubungan antara politik dan ekonomi.

Sedangkan menurut DR. Mohtar Mas'oed dalam bukunya *Ekonomi Politik Internasional*, ekonomi politik internasional didefinisikan sebagai studi tentang saling hubungan antara ekonomi dan politik dalam arena internasional. Ketika sebuah negara melakukan suatu hubungan dengan negara lain ataupun dengan sebuah organisasi internasional, hubungan itu tidak lagi semata-mata hanya atas dasar kepentingan politik ataupun kepentingan ekonomi saja, melainkan adanya keterkaitan tujuan politik serta ekonomi dalam hubungan tersebut.

Menurut Spero terdapat empat cara faktor politik mempengaruhi ekonomi, yaitu:

1. Struktur dan operasi sistem ekonomi internasional dipengaruhi oleh struktur dan operasi politik internasional
2. Kepedulian-kepedulian politik selalu mempengaruhi kebijakan ekonomi.
3. Kebijakan-kebijakan ekonomi dituntun oleh kebijakan politik
4. Hubungan dalam ekonomi internasional adalah hubungan politik interaksi ekonomi internasional dimana aktor negara dan non-negraa mengatur kerjasama untuk mencapai suatu tujuan (Spero, 1985: 10).

Melalui faktor-faktor di atas, dapat dilihat bahwa factor politik suatu negara dapat mempengaruhi cara negara tersebut dalam menentukan kebijakan-kebijakan

ekonomi yang akan diambil oleh negara tersebut. Hal ini dikarenakan keadaan politik suatu negara akan berpengaruh dalam perekonomian negara, apabila kondisi politik negara tidak stabil, maka hal ini akan membuat keputusan yang diambil oleh negara mengenai perekonomian tidak akan berjalan dengan sempurna. Karena untuk mencapai perekonomian yang maju dan stabil, maka keadaan politik negara tersebut pun harus dalam keadaan stabil, sehingga diharapkan tidak akan mengganggu perkembangan ekonomi negara tersebut.

Konsep-konsep dan teori yang dipandang paling banyak diperbincangkan dalam ekonomi politik internasional pada bentang kontemporer yakni politik ekonomi, keterbelakangan, ketergantungan, saling ketergantungan, rejim internasional, pembangunan ekonomi, ekonomi kesejahteraan, dan teori ekonomi politik kontemporer lainnya.

Secara Umum Ekonomi Politik Internasional merupakan studi yang memperlajari keerhubungan antara ekonomi internasional dengan politik internasional yang muncul akibat berkembanganya masalah-masalah yang terjadi dalam sistem internasional. Sehingga secara empirik, tingkat saling ketergantungan dalam masyarakat internasional yang semakin tinggi sebagai akibat proses transnasionalisme dalam ekonomi yang melewati batas negara seperti peningkatan perdagangan, proses globalisasi dan terciptanya kelompok ekonomi regional telah menjadikan suatu kondisi dimana tidak ada lagi suatu kebijakan ekonomi politik nasional yang bersifat domestik. (Perwita dan Yani, 2005: 77)

Konfigurasi pendekatan ekonomi politik internasional adalah tidak tunggal (*monodisiplin*), artinya bahwa implementasi alat-alat analisisnya dapat dilihat pada sejumlah teori dan konsep-konsep yang mendasari substansi ekonomi politik, seperti interdepedensi, depedensi, keterbelakangan, pertumbuhan, perkembangan, pembangunan ekonomi sosial, sistem-sistem ekonomi dan termasuk juga persoalan *power politics, realisme* dan *idealisme, linier* dan *strukturalis* internasional, *globalisasi,* atau *regionalisme,* dan lain-lain (Ikbar, 2002:21).

2.2.4.1 Konsep Perekonomian

Kajian mengenai ekonomi kurang mendapat perhatian pada saat perang, seorang presiden Perancis Charles de Gaulle mengistilahkan persoalan ekonomi dengan *quarter master's stuff*atau politik tingkat rendah. Secara sederhana pernyataan ini menunjukan mengenai perhatian akan persoalan ekonomi sebagai persoalan yang hanya perlu dilihat sekedarnya saja, sementara yang lebih penting adalah politik tingkat tinggi yang berkaitan dengan isu besar, seperti perang dan damai. Namun seiring berjalannya waktu, serta juga diiringi oleh perubahan zaman, maka konsep perekonomian pun tidak dapat terpisahkan dari politik. Ketika sebuah negara ingin melakukan hubungan politik dengan negara lain, maka negara tersebut tidak hanya semata-mata memiliki kepentingan politik dengan negara itu, tetapi juga akan memiliki kepentingan ekonomi.

Ilmu Ekonomi (*Economics*) merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan setiap tindakan atas proses yang bersangkut paut dengan penciptaan barang-barang dan jasa-jasa yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan

manusia dan secara lebih spesifik, istilah ekonomi digunakan untuk menerangkan produksi barang-barang dan jasa yang dihasilkan dengan pengetahuan teknis yang berlaku. Menurut *economic dictionary "Sloan and Zurcher*", *economic* adalah keseluruhan pengetahuan yang mempercoalkan penciptaan dan penggunaan barang atau jasa untuk pemenuhan kebutuhan manusia, dalam ilmu ekonomi biasanya dimaksudkan persoalan-persoalan sebagai berikut: *apply economics, consumer economics, macro and micro economics, international economics, institutional economics.*

Berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi, negara-negara dibagi menjadi beberapa kategori, seperti negara dunia kesatu (Negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi maju), negara dunia kedua (negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi lumayan maju), dan negara dunia ketiga (negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi sangat rendah). Sering terjadinya ketimpangan pertumbuhan pada negara dunia kesatu dan ketiga pada dasarnya disebabkan oleh persoalan ekonomi politik sebagai kegagalan perencanaan dalam tata dunia yang berkepanjangan dan pendekatan yang tidak alami. Tidak meratanya pembagian kekayaan di sebagian besar negara dunia ketiga dan melebihi tidak meratanya pembagian kekayaan yang maksimal sebagian besar di negara dunia ketiga menyebabkan rakyatnya hidup di garis kemiskinan. Menurut Robert Gilpin isu-isu yang ada ini, dibagi menjadi tiga unsur inti, yaitu:

- Penyebab dan hal-hal yang mempengaruhi kebagkitan rasa
- Hubungan antara perubahan ekonomi dan perubahan politik
- Pengertian ekonomi dunia terhadap ekonomi domestik

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat hubungan antara ekonomi dan politik suatu negara. Hal ini dikarenakan ketika terjadi perubahan politik di sebuah negara, maka hal itu juga akan berdampak pada keputusan ekonomi yang akan diambil oleh negara tersebut. Begitu juga sebaliknya, ketika perekonomian suatu negara berubah, maka keadaan politik di negara tersebut juga akan berubah.